BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan Indonesia juga memiliki daerah pesisir yang sangat luas pula. Hal ini membuat Indonesia memiliki 25%, atau sekitar 4,2 juta ha dari 17 juta ha ekosistem mangrove di dunia yang tersisa saat ini (Ghufron dan Kordi, 2012:v-vi). Hutan Mangrove yang berada di daerah transisi antara darat dan laut menjadikan mangrove sebagai penyangga penting. Ekositem Mangrove yang memiliki fungsi kompleks di antara, sebagai peredam gelombang laut dan badai, pelindung pantai dari abrasi dan erosi, sebagai tempat berlindung dan mencari makanan bagi biota perairan payau, penghasil kayu dan dapat di manfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan dan buah jenis Tanjang dapat di olah sebagai bahan makanan.

"Pertambahan penduduk Indonesia yang meningkat pesat memunculkan berbagai permasalahan dalam pembangunan, di antaranya adalah meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup. Upaya pemenuhan kebutuhan yang meningkat menyebabkan tekanan terhadap ruang dan sumberdaya alam, terutama dikarenakan perekonomian Indonesia masih sangat tergantung kepada pemanfaatan sumberdaya alamnya, termasuk sumberdaya hutan" (Purwoko, 2009:5).

Hal tersebut membuat manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan lahan hingga mengkonversi areal hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, industri dan pertanian. Selain itu, juga

meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu mangrove menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove. Kegiatan lain yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove cukup besar adalah pembukaan tambak-tambak untuk budi daya perairan, baik udang maupun ikan.

Mengkaji betapa pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan dan manusia maka pemerintah menganggap bahwa perlunya perhatian serius dalam melindungi dan menciptakan konservasi hutan mangrove. Maka pemerintah pun mengeluarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang di dalamnya juga mengatur kawasan lindung Hutan Mangrove.

Daerah penyebaran Hutan Mangrove di Indonesia salah satu terbesar terdapat di daerah pantai timur Sumatra. Salah satu yang paling besar kerusakan hutan mangrove di Pantai Timur Sumatera Utara berada di Kabupaten Langkat. Dan menurut Wakil Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lantera Institute Kabupaten Langkat bahwa kerusakan hutan mangrove mencapai sekitar 20.000 ha (AntaranNews.com, 20/07/2014).

Kabupaten Langkat berada di provinsi Sumatra Utara dengan ibu kotanya berada di Stabat. Secara astronomis kabupaten Langkat berada di 3^0 14' – 4^0 13' LU dan 97^0 52'- 98^0 45' BT. Secara geografis berada di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Nangro Aceh Darussalam, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Tanah Alas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Kabupaten Langkat memiliki 22 kecamatan dengan luas 6.272 km^2.

Ekositem Mangrove yang sebagai ekosistem pesisir merupakan ekosistem pelindung dari berbagai ancaman alam di daerah pesisir dan sebagai habitat berbagai macam biota laut. Namun saat ini semakin hari semakin kritis ketersediaannya di Kecamatan Pangkalan Susu, yang ketersediaannya di pengaruhi oleh penebangan Hutan Mangrove dan pengalih fungsian lahan menjadi tambak. Terus berkurangnya ketersediaan hutan mangrove di Kecamatan Pangkalan Susu menyebabkan tingkat kerusakan kawasan mangrove tinggi di Kabupaten Langkat. Hal ini menyebabkan masyarakat sekitar menjadi terkenak dampak langsung berupa terancamnya sumber pendapatan masyarakat Kecamatan Pangkalan Susu yang mayoritasnya memanfaatkan dari laut. Berupa ikan, kerang, kepiting dan udang yang semakin berkurang jumlahnya. Belum lagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut sering terancam kehilangn tempat tinggal sewaktu-waktu, di karenakan pasang air laut yang tinggi dan angin yang kuat dapat menghancurkan rumah mereka. Hal ini sudah menerpa beberapa kepala keluarga di Kecamatan Pangkalan Susu.

Banyak penduduk yang masih tinggal di daerah tersebut dikarenakan wilayah tersebut menyediakan kemudahan bagi aktivitas ekonomi penduduk, tranportasi,aksesibilitas dan rekreasi. Karna itu, ekosistem mangrove merupakan salah satu area yang sering dialih fungsikan sebagai perkebunan, pemukiman dan sebagainya. Konversi ekosistem mangrove untuk perkebunan dan pemukiman masih terus berlangsung di Kecamatan Pangkalan Susu. Anjuran pemerintah agar konversi mangrove perlu menyisakan sebagian areal hutan bakau sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) tidak ditaati. Padahal daerah penyangga atau biasa disebut jalur hijau diatur oleh pemerintah melalui UU no 27 tahun 2007 tentang Pengolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jalur hijau minimal 100 meter dari pasang tertinggi.

Salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut perlunya peta aktual penggunaan lahan yang sangat penting untuk keperluan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Dalam pemenuhannya dapat di gunakan sebuah citra yang relevan dan diolah untuk menghasilkan peta penggunaan lahan. Citra satelit yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis citra satelit *Quickbird* tahun 2005 dan tahun 2015 dengan memiliki resolusi spasial hingga 0,61 meter – 2,4 meter untuk moda *pankromatik* dan multispektral, karena jenis citra ini memiliki kualitas dan resolusi yang baik.

Keakuratan data citra akan menentukan keefektifan data penginderaan jauh untuk digunakan dalam menginterpretasikan objek-objek yang ada di lapangan. Semakin akurat data maka akan semakin efektif data tersebut digunakan untuk menginterpretasi perubahan lahan yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Jadi, dalam penginderaan jauh sangat penting diketahui seberapa akurat data yang digunakan sehingga data tersebut dapat menghasilkan data yang benar, akurat dan terpercaya.

Hasil interpretasi citra selanjutnya diolah dengan menggunakan komputer yang dilengkapi perangkat lunak Sistem Informasi Geografi (SIG) yang berupa *ArcGIS* 10,1. SIG digunakan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat terhadap data penelitian ini. Data yang besar dapat diolah lebih cepat, efisien dan dapat ditayangkan kembali karena data tersimpan dalam bentuk digital. Hasilnya berupa peta aktual digital penggunaan lahan yang berguna bagi perencana dan pengelolaan kota.

Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki kawasan Mangrove yang besar di Provinsi Sumatera Utara, maka pemerintah Kabupaten Langkat perlu menjaga

ekosistem Hutan Mangrove di karenakan fungsinya yang kompleks. Dan menerapkan RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) sesuai dengan amanah UU no 27 tahun 2007 tentang pengolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan perubahan penggunaan lahan di kawasan pesisir di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat pada tahun 2005 dan pada tahun 2015. Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa besar perubahan lahan mangrove yang telah terjadi pada tahun 2005 dan pada tahun 2015 dengan menggunakan citra *Quickbird*. Dari hasil pengolahan data tersebut akan didapat informasi perubahan lahan dalam bentuk peta. Peta informasi perubahan lahan tersebut memungkinkan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan serta pemanfaatan lahan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi identifikasi masalah dan dalam penelitian ini adalah : (1) Meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup, (2) Terjadinya penggunaan lahan di Kawasan Pesisir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat baik faktor fisik maupun non-fisik , (3) Terancamnya tempat tinggal penduduk oleh pasca air laut dan angin yang kuat ,(4) Adanya kegiatan konversi Hutan Mangrove menjadi perumahan, tambak, dan lain-lain yang merusak habitat hutan mangrove, (5) Banyaknya masyarakat yang melanggar *buffer zone* menurut UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : Perubahan penggunaan lahan Mangrove di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat pada tahun 2005 dan pada tahun 2015

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana Perubahan penggunaan lahan Mangrove di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat pada tahun 2005 dan pada tahun 2015 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

Mengetahui Perubahan penggunaan lahan Mangrove di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat pada tahun 2005 dan pada tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi dalam mengambil kebijakan dan perencanaan yang berhubungan dengan Perencanaan Pengembangan Wilayah di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.
2. Sebagai tambahan informasi tentang perubahan penggunaan lahan bagi masyarakat Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.
3. Sebagai studi perbandingan bagi peneliti lain khususnya dalam objek yang sama pada tempat yang berbeda demi penyempurnaan yang berbeda.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY